

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Temuan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 1. Selain itu, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah akan berdampak langsung terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia.
2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 2. Sedangkan, dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 3. Selain itu, dana alokasi khusus berpengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia Artinya, penggunaan dana alokasi khusus dapat digunakan untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

4. Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 4. Artinya, semakin tinggi dana bagi hasil, maka akan berdampak pada tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia secara langsung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti mengambil sampel penelitian yang diteliti hanya dari satu kawasan yaitu kawasan timur Indonesia dan menggunakan pemerintah kabupaten dan kota wilayah timur Indonesia dengan angka indeks pembangunan manusia antara 66-80. Padahal, beberapa kabupaten/kota wilayah Indonesia timur juga memiliki angka indeks pembangunan manusia dibawah 66.

5.3 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk beberapa pihak, yaitu bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel penelitian dari kawasan Indonesia bagian lain karena Indonesia memiliki 2 zona waktu yang lain seperti Waktu Indonesia Barat dan Waktu Indonesia bagian Tengah.

Disarankan untuk menggunakan angka indeks pembangunan manusia dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga tidak memerlukan kriteria pemilihan sampel melalui angka indeks pembangunan manusia. Bagi Praktis, dalam hal ini pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya agar kabupaten atau kota dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari angka indeks pembangunan manusia. Selain itu, peningkatan alokasi belanja modal bagi suatu daerah dapat menambah belanja publik dalam bentuk belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiansyah, dan V.A. Widiyaningsih, 2014, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, *Simposium Nasional Akuntansi 17*, Mataram.
- Ardhini, dan S. Handayani, 2011, Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah), *E-Journal Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Arifah, D.A., 2012, Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik, *Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1*, Semarang.
- Arwati, D., dan N. Hadiati, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*, Bandung.
- Bastian, I., 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Batafor, G.G., 2011, Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Propinsi NTT, *Tesis*, Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana

Christy, F.A dan P.H. Adi, 2009, Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia, *Makalah* disampaikan pada The 3rd National Conference UKWMS Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014, Laporan Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

_____, 2014, Deskripsi dan Analisis APBD 2014, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I., 2007, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamzah, A., 2007, Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur), *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

Harianto, D., dan P.H. Adi., 2007, Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

Hardiningsih, P., dan R. M. Oktaviani, 2013, Determinan Belanja Modal dan Konsekuensi terhadap Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, September.

Mahsun, H., P. Andre, dan S. Firman., 2013, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Pemerintah, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia.

_____, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia.

_____, 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Republik Indonesia.

Sarwono, J., 2010, *PASW statistics 18: Belajar Statistik Menjadi Mudah dan Cepat*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Setyowati, L., dan Y. H. Suparwati., 2012, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD, terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah), *Jurnal Prestasi*. Vol. 9, No. 1, Semarang.
- Sularso, H., dan Y. Restianto, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Media Riset Akuntansi*, Vol 1, No. 2, Jakarta.
- Sumiyati, E.E., 2011, Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat, *E-Journal Kopertis Wilayah IV*, Cimahi.
- Suryabrata, S., 2005, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tuasikal, A., 2008, Pengaruh DAU,DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 1, No. 2, Ambon: Hal. 142-155.
- UNDP, 1995, *Human Development Report 1995*, Oxford University Press, New York, United National Development Program.
- Vegirawati, T., 2012, Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2, No. 1, Palembang.

Wandira, A. G., 2013, Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal, *Accounting Analysis Journal*, Semarang.

www.bps.go.id

www.kpu.go.id